KEBIJAKAN ARAB SAUDI DALAM KONFLIK YAMAN PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA SALMAN

Author: Waritsa Yolanda
waritsa.yolanda@gmail.com
Advisor: Supervisor: Drs. M. Saeri, M.Hum
Bibliografi: 35 Journals, 16 Books, 20 Official Documents, 40 Websites
International Relations
Faculty of Social and Political Science – University of Riau
Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru,
Riau 28293

Abstract

This research aims to explain Saudi Arabia's Foreign Policy towards Yemen's Conflict under King Salman's Era. The research uses the Perspective of Neorealism which believes that international system is anarchy, cooperation build up to maximize the power of the country to survive in the anarchy situation. Theory of decision making process that used in this research notice to explain Saudi Arabia's decision making process to get involve in Yemen's conflict. This research is also supported by the concept of intervention which notice to explain the type of intervention that Saudi Arabia used when doing the intervention on Yemen's conflict under King Salman's era.

The method used in this research from the measurement of the data is qualitative research method, and from the way of processing data is explanative method. Furthermore, the technique of data analysis is based on data from literature studies with the consideration that the data is capable in providing information regarding the problem under research.

The results of the research explains that the reason Saudi Arabia intervened by doing Operation Decisive Storm, Operation Restoring Hope and Operation Golden Victory in the Yemen conflict was because Saudi Arabia wanted to prevent the expansion of Yemen's conflict.

Keyword : Military Intervention, Regional Leader, Foreign Politcy, King Salman, Operation Decisive Storm, Operation Restoring Hope, Operation Golden Victory

PENDAHULUAN

Keterlibatan negara asing ataupun aktor internasional dalam sebuah konflik internal merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi di kawasan Timur Tengah. Konflik internal didefinisikan sebagai konflik yang melibatkan faksi-faksi domestik seperti pemerintah dan kelompok pemberontak. Ketika konflik menjadi semakin memanas, faksi-faksi yang terlibat dalam konflik akan mencoba mencari dukungan dari aktor regional maupun internasional untuk memastikan dua hal: *survivability* dan memperbesar kemungkinan kemenangannya atas pihak musuh. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, faksi yang berkonflik akan mencari rekan regional yang bisa mendukung keberlangsungan hidupnya. Dengan terjalinnya hubungan antara faksi yang berkonflik dengan aktor eksternal, maka konflik tersebut menjadi memiliki dimensi internasional. Dalam kasus konflik internal Yaman, Arab Saudi dan Iran menjadi aktor eksternal yang paling dominan dengan mendukung faksi-faksi dalam konflik: Pemerintah Yaman dan Pemberontak Houthi.

Konflik di Yaman merupakan konflik yang mempertemukan pemerintah Yaman dengan kelompok pemberontak Houthi. Kedua pihak memiliki identitas agama yang berbeda. Pemerintah Yaman yang dikuasai oleh Partai Islah dekat dengan aliran Islam Sunni, sedangkan mayoritas kelompok pemberontak Houthi adalah penganut Syiah Zaidi. Perlawanan Houthi kepada rezim penguasa di Yaman sudah terjadi semenjak tahun 1990. Namun, eskalasi konflik antara pemerintah dan Houthi baru terjadi pada tahun 2004, ketika Hussein Badreddin al-Houthi selaku pemimpin gerakan pemberontakan saat itu dibunuh oleh tentara Yaman. Hal ini membuat pergerakan Houthi semakin keras terhadap pemerintah Yaman. Berbagai kontak senjata antara pemerintah dan pemberontak Houthi terjadi selama enam tahun sejak terbunuhnya Hussein (2004-2010). Namun, semua serangan Houthi berhasil diredam oleh tentara Yaman yang saat itu berada dibawah pimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh.

Kondisi politik Yaman pun tak kunjung membaik walaupun kepala pemerintahan telah berganti ke tangan Abd Rabbu Mansour Hadi. Demonstrasi anti-pemerintah yang menuntut untuk adanya reformasi politik dan ekonomi Yaman terus dilakukan oleh pihak oposisi. Konflik pun akhirnya pecah ketika pada September 2014, pemerintah Hadi membuat kebijakan untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak. Hal ini sontak membuat rakyat secara kompak mengambil sikap dengan melakukan demonstrasi akbar yang dimotori oleh Houthi dan kelompok oposisi lainnya. Mantan presiden Saleh pun turut memanfaatkan momen ini untuk kembali mendapatkan kekuasaan di Yaman. Dengan berlandaskan musuh yang sama, kelompok pemberontak Houthi dan Saleh saling bekerja sama untuk melawan pemerintah Hadi. Pemberontak Houthi pun kemudian berhasil menguasai ibukota Sana'a pada September 2014. Fasilitas negara dan bangunan militer tak lepas dari sasaran Houthi, yang membuat mereka mendapatkan kuasa atas Sana'a sekaligus pemerintahan Yaman.

Kondisi politik Yaman pun tak kunjung membaik walaupun kepala pemerintahan telah berganti ke tangan Abd Rabbu Mansour Hadi. Demonstrasi anti-pemerintah yang menuntut untuk adanya reformasi politik dan ekonomi Yaman terus dilakukan oleh pihak oposisi. Konflik pun akhirnya pecah

ketika pada September 2014, pemerintah Hadi membuat kebijakan untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak. Hal ini sontak membuat rakyat secara kompak mengambil sikap dengan melakukan demonstrasi akbar yang dimotori oleh Houthi dan kelompok oposisi lainnya. Mantan presiden Saleh pun turut memanfaatkan momen ini untuk kembali mendapatkan kekuasaan di Yaman. Dengan berlandaskan musuh yang sama, kelompok pemberontak Houthi dan Saleh saling bekerja sama untuk melawan pemerintah Hadi. Pemberontak Houthi pun kemudian berhasil menguasai ibukota Sana'a pada September 2014. Fasilitas negara dan bangunan militer tak lepas dari sasaran Houthi, yang membuat mereka mendapatkan kuasa atas Sana'a sekaligus pemerintahan Yaman.

Arab Saudi sebelumnya tidak pernah melakukan intervensi militer secara besar-besaran terhadap konflik domestik Yaman sejak awal dimulainya konflik ini hingga pada awal tahun 2014. Keputusan Arab Saudi berubah ketika kota Sana'a jatuh ke tangan Houthi pada tanggal 21 September 2014[1], yang mana saat itu Arab Saudi mendukung Abd Rabbuh Mansur Hadi hingga perang saudara akhirnya pecah pada tahun 2015.[2] Arab Saudi kemudian bersama dengan koalisinya membentuk sebuah operasi penyerangan pada Houthi yang dikenal dengan nama *Operation Decisive Storm*.[3] Operasi lainnya dilanjutkan dengan Operasi *Restoring Hope* dan *Operation Golden Victory* pada akhir tahun 2019.

KERANGKA TEORI

a. Perspektif: Neorealisme

Neorealisme adalah sebuah perspektif dalam Hubungan Internasional yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1979 melalui bukunya, "Theory of International Politics". Menurut Waltz, dunia berada dalam hubungan-hubungan yang sistemik, dimana perilaku-perilaku dan kebijakan suatu negara dipengaruhi oleh suatu sistem internasional yang terjadi saat itu, secara langsung atau tidak sial yang teliti dan positivistik..

Neorealis tetap mempertahankan nilai realis yang mengatakan dunia adalah sebuah tempat yang bersifat antagonistik dan konfliktual karena adanya struktur anarkis dalam hubungan internasional. Namun, yang membedakan realis dengan neorealis adalah aktor yang berperan dalam hubungan internasional tersebut. Menurut realisme klasik, aktor utama dalam hubungan internasional adalah negara bangsa (nation-state), berbeda dengan neorealisme, dimana menurut neorealisme aktor utama dalam hubungan internasional adalah sistem internasional itu sendiri, yang mempengaruhi negara-negara dalam bertindak.

Neorealisme juga disebut sebagai realisme struktural, karena pada dasarnya sifat manusia tidak ada hubungannya dengan mengapa negara ingin berkuasa, bahwa ini hanyalah sebuah strukturisasi dalam sistem internasional lah yang akhirnya

[1] Saudi Arabia Embassy, "White Paper: Saudi Arabia and Yemen Conflict", (April 2017), https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/WhitePaper_Yemen_April2017_0.pdf (diakses pada 4 April 2019), Hal. 7

[2] Cristian Nunlis, *War in Yemen and Saudi Interventions*, (Zurich: CSS Analysis in Security Policy, 2015), h. 1

[3] Ghassan Shabaneh, "Operation Decisive Storm: Objectives and Hurdles", (*Al Jazeera Centre for Studies*, 2015), h. 3-4

memaksa suatu negara untuk memperoleh kekuasaan itu sendiri. Realisme struktural mempunyai pendapat-pendapat atau asumsi-asumsi dasar yang lebih realistis dalam menyikapi sebuah fenomena. Bahwa tidak sepenuhnya benar terlalu pesimis mengenai sifat dasar manusia karena sebenarnya bukan itu saja yang menjadi fokus mereka untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan strukturisasi dari sistem internasional itu sendiri ditambah lagi dengan tujuan utama setiap negara untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya agar bisa terus survive.

Dalam penelitian ini, kondisi keamanan regional di Timur Tengah, khususnya perbatasan Arab Saudi dan Yaman, telah membuat Arab Saudi merasa kepentingannya akan terancam jika tidak melakukan suatu tindakan untuk merespon dinamika ancaman tersebut. Konflik di Yaman, pemberontakan di Yaman oleh Houthi dan meningkatnya pengaruh teroris AL-qAEDA merupakan ancaman utama yang dirasakan Arab Saudi di kawasan ini, oleh karena itu Arab Saudi harus lebih menanamkan keberadaannya disana serta bekerjasama dengan negara-negara GCC lainnya dan melakukan kebijakan intervensinya di Yaman.

b. Tingkat Analisa: Negara-Bangsa

Tingkat analisa dalam penelitian ini adalah tingkat analisa negara-bangsa, dimana analisa negara-bangsa melihat bahwa hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara-bangsa. Dengan kata lain, kita harus mempelajari proses pembuatan keputusan tentangan hubungan internasional, yaitu politik luar negeri oleh suatu negara-bangsa sebagai suatu unit yang utuh.

Penelitian ini akan melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan nilai-nilai dan karakteristik dari Arab Saudi sebagai suatu dasar yang menyebabkan hubungannya dengan negara lain diwarnai dengan dengan persepsi ancaman dan permusuhan, yang kemudian menggiring tanggapan terhadap sikap dan tindakan satu sama lain. Lebih lanjut, dengan menggunakan tingkat analisa negara-bangsa untuk menganalisa, penulis melihat bahwa perilaku atau kebijakan Arab Saudi di bawah pemerintahan Raja Salman dalam menanggapi konflik Yaman sebagai suatu perwujudan dari kepentingan Arab Saudi sebagai suatu aktor.

c. Teori: Kebijakan Luar Negeri

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebiajkan Luar Negeri oleh James N. Rosenau. Kebijakan luar negeri pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme negara yang beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di lingkungannya, yang diproses di benak pembuat kebijakan yang bertindak untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang-peluang yang didasarkan pada persepsi mengenai lingkungannya. Hal ini karena kebijakan luar negeri meliputi semua sikap dan aktivitas melalui mana masyarakat nasional yang terorganisir berusah untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan internasionalnya. Tindakan atau kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi atau mempertahankan aspek-aspek yang tidak diinginkannya. Tindakan tersebut memerlukan perhitungan dan berorientasi pada tujuan.

Rosenau membagi 3 konsepsi utama kebijakan luar negeri, yang perlu dipahami untuk dapat menganalisa

kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu[4] :

1. kebijakan luar negeri sebagai perangkat orientasi, dimana kebijakan luar negeri mengacu pada sikap, persepsi, nilai-nilai yang semua ini berasal dari pengalaman historis dan situasi strategis negara yang menandai tempatnya di dunia politik atau posisinya dalam politik internasional.
2. kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan komitmen dan rencana tindakan, di mana kebijakan luar negeri dipandang sebagai strategi, keputusan nyata, dan kebijakan yang dapat diobservasi, yang diambil ketika negara-negara terkait dengan situasi lingkungan eksternalnya.
3. kebijakan luar negeri sebagai suatu bentuk perilaku, kebiajakn luar negeri mengacu pada fase empiris yang melibatkan langkah-langkah konkrit atau kegiatan itu mengikuti pemahaman terhadap orientasi dari kebijakan luar negeri.

Pada akhirnya, melalui teori kebijakan luar negeri James N. Rosenau, penulis menganalisa kebijakan Arab Saudi di bawah pemerintahan Raja Salman dalam menghadapi konflik Yaman, sebagai seperangkat orientasi, di mana sikap, persepsi, dan nilai-nilai, yang semuanya ini berasal dari pengalaman historis dan situasi strategis yang menandai posisinya dalam politik internasional, menjadi panduan dalam mengambil kebijakan oleh Arab Saudi. Kemudian penulis juga memandang bahwa kebijakan Arab Saudi sebagai sekumpulan komitmen dan rencana tindakan atau strategi, di mana kebijakan Arab Saudi dapat dipandang sebagai suatu cara atau sarana dalam menanggapi lingkungan eksternalnya, yaitu konflik yang terjadi di Yaman. Terakhir, kebijakan Arab Saudi dipandang sebagai bentuk perilaku, kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai langkah nyata atau sikap/bentuk adaptasi Arab Saudi dalam menanggapi lingkungan eksternalnya yaitu konflik yang terjadi di Yaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi terkait Intervensi Militer dalam Konflik Yaman pada Masa Pemerintahan Raja Salman

Arab Saudi adalah negara kunci di kawasan Timur Tengah. Tidak hanya merupakan rumah bagi hampir seperlima dari cadangan minyak global, tetapi juga secara tradisional mewakili benteng stabilitas di lingkungan yang tidak stabil. Selain itu, Saudi sering menjadi sekutu yang dapat diandalkan Barat melawan musuh bersama setidaknya sejak tahun 1950-an. Namun, sejak dimulainya Arab Spring tahun 2011, Arab Saudi melihat Iran sebagai saingannya dalam menjadi kekuatan regional di kawasan Timur Tengah. Hal ini dilihat dari keterlibatan Iran dalam membantu pemberontak Houthi dalam Konflik Sipil Yaman.

Arab Saudi yang hingga tahun 2014 masih aktif membantu Yaman menyelesaikan krisisnya dalam bentuk bantuan dana, namun pada tahun 2015 Arab Saudi melakukan koalisi dengan 9 negara dan Amerika Serikat untuk mengintervensi konflik Yaman dalam *Operation Decisive Storm*. Tak hanya itu, intervensi ini masih berlanjut

[4] Vinsensio Dugis, "Analysing Foreign Policy". Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Politik Universitas Airlangga. Th. XX No.2 (2007) https://www.researchgate.net/publication/28726 9388_Analysing_Foreign_Policy (diakses 16 Oktober 2019), 115

hingga tahun 2018 melalui *Operation Restoring Hope* dan *Operation Golden Victory*.

Intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi ini menimbulkan banyak pertanyaan dalam masyarakat Internasional. Dalam hipotesa dijelaskan bahwa kepentingan Arab Saudi melakukan intervensi militer adalah untuk menyeimbangkan kekuatan Iran yang telah menjadi poros polarisasi di Timur Tengah. Iran telah menyebarkan kekuatannya di Timur Tengah dengan menyebarkan ideologi Syiahnya ke negara Lebanon melalui Hezbollah, Irak melalui birokrasi pemerintahannya, di Suriah melalui pemberian dukungan kepada pemberontak di konflik Suriah, sedangkan di Yaman melalui dukungan kepada kelompok Houthi. Sistem internasional yang ada di kawasan Timur Tengah ini sesuai dengan model fragmentasi-nasional (Multipolar) menurut Couloumbus dan Wolfe.

Arab Saudi melakukan beberapa bentuk kebijakan intervensi dalam konflik Yaman dari tahun 2015 – 2019, yaitu dalam bentuk intervensi militer, kebijakan diplomasi dan kebiajakn bantuan kemanusiaan. Penjelasan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Intervensi Militer

Kebijakan intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan koalisi dalam konflik Yaman sejak tahun 2015 hingga 2019 dijabarkan sebagai berikut :

1. *Operation Decisive Storm*

Operasi *Decisive Storm* dimulai semenjak Rabu Malam, tanggal 25 Maret 2015, yang diumumkan beberapa jam setelah bom tersebut diluncurkan. Operasi yang juga disebut dengan Asifatul al-Hazm ini didukung oleh negara-negara OKI, koalisi negara-negara Muslim Sunni, termasuk negara Dewan Kerjasaman Negara Teluk (GCC), yaitu Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania, Maroko, Pakistan dan Sudan. Negara Amerika Serikat juga ikut menyediakan logistik dan intelijen dan memiliki sel perencanaan bersama dengan Saudi. Intervensi militer dimulai setelah Presiden Yaman ‘Abd Rabbuh Mansur Hadi, pada 25 Maret, meminta bantuan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan milisi Houthi maju menuju Aden.[5]

Tujuan yang lebih luas dari operasi ini adalah untuk menciptakan tatanan politik baru di Timur Tengah terkhususnya di Yaman dan membendung Iran dalam mencampuri urusan negara-negara di Timur Tengah. Jika Yaman jatuh ke tangan pemberontak Houthi, maka negara-negara GCC menjadi terkepung oleh pengaruh Syiah-Iran dan proxy-nya Yaman memiliki nilai yang sangat strategis bagi negara-negara GCC. Instabilitas di Yaman bisa menyebabkan kerugian baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi militer bagi negara GCC terutama Mesir dan Sudan yang berbatasan langsung dengan Laut Merah. Membiarkan Yaman dikuasai oleh aktor non-negara yang tidak bertanggungjawab dapat mengganggu perdamaian global. Oleh karenanya negara-negara GCC merespon doktrin dari Raja Salman untuk terus memantau dan melindungi Yaman dari para pemberontak.[6]

2. *Operation Restoring Hope*

Arab Saudi memulai operasi intervensi militernya kembali di Yaman,

[5] Stenslie, Stig. 2015. “Decisive Storm”: Saudi Arabia’s attack on the Houthis in Yemen. Norwegian Peacebuilding Resource Center. Hlm. 1

[6] *ibid*

yang dikenal dengan *Operation Renewal of Hope* atau juga dikenal dengan *Operation Restoring Hope* setelah berakhirnya *Operation Decisive Storm* pada 21 April 2015. Koalisi Arab Saudi percaya bahwa *Operation Decisive Storm* telah mencapai tujuannya dalam melindungi rakyat Yaman, mencegah masuknya senjata dari luar Yaman, dan melegitimasi pemerintah Hadi. Operasi *Restoring Hope* akan menjadi fokus pada mendukung pembangunan, mencegah Houthi untuk melakukan lebih banyak pelanggaran kemanusiaan, mendukung kegiatan kemanusiaan, dan menjaga perbatasan Yaman-Saudi dan hubungan dengan wilayah sekitarnya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tindakan militer akan berhenti karena masih bisa dilakukan jika perlu. Bahkan, hingga Mei 2017, ada sekitar 90.000 serangan udara oleh pasukan koalisi, yang berarti terdapat rata-rata satu serangan udara setiap 12 menit, mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan, hingga 10.000 korban.

Operasi *Restoring Hope* telah berlangsung lebih dari 4 tahun hingga saat ini yang dimulai sejak tangga 22 April 2015. Salah satu hasil dari operasi tahap pertama dari koalisi Arab Saudi yaitu berhasil membersihkan wilayah udara Yaman dari kekuatan Houthi dan memblokadi wilayah laut Yaman untuk mencegah Iran mengirimkan bantuan senjata bagi mitra Houthi. Operasi ini juga ditujukan untuk segera mengimplementasikan proses politik di Yaman. Operasi ini terdiri dari 4 penyerangan besar, yaitu penyerangan udara, pertempuran lintas batas, pertempuran darat, dan penyerangan arah laut.

3. *Operation Golden Victory*

Operation Golden Victory atau sering juga dikenal dengan Pertempuran *Al Hudaydah* adalah serangan koalisi pimpinan Saudi di kota pelabuhan Al Hudaydah di Yaman. Operasi ini dipelopori oleh Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dan telah dianggap sebagai pertempuran terbesar sejak dimulainya intervensi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman pada tahun 2015. Operasi ini berlangsung selama tiga fase, yaitu fase pertama pada tanggal 13–22 Juni 2018 (1 minggu 2 hari), fase kedua tanggal 9–16 September 2018 (1 minggu) dan fase ketiga pada tanggal 1–13 November 2018 (1 minggu 5 hari).

Operasi *Golden Victory* yang dimulai pada tanggal 13 Juni 2018 ini bertujuan untuk mengusir pasukan Houthi dari pelabuhan, tujuan serangan itu adalah untuk merebut kembali kota Al Hudaydah dan mengakhiri dugaan pasokan dana, senjata, dan rudal balistik ke Houthi melalui pelabuhan Al Hudaydah.[7] Houthi membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka membela Yaman dari invasi yang didukung AS.[8]

Pelabuhan memainkan peran penting dalam memberikan lebih dari 80 persen makanan dan bantuan ke Yaman, sehingga beberapa lembaga kemanusiaan memperingatkan akan konsekuensi kemanusiaan yang dahsyat. PBB memperingatkan bahwa pertempuran itu dapat mengancam kehidupan 300.000 anak-anak di daerah berpenduduk dan mencegah pengiriman

[7] "Saudi Arabia, UAE, launch attack on Yemen's port city of Hudaida". Al Jazeera English. Diakses pada tanggal 10 November 2019.

[8] Reuters. 2018. Arab states launch biggest assault of Yemen war with attack on main port. https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/arab-states-launch-biggest-assault-of-yemen-war-with-attack-on-main-port-idUSKBN1J90B. Diakses pada tanggal 20 November 2019

makanan ke jutaan orang atau lebih.[9] PBB telah melakukan berbagai upaya untuk mengambil alih kendali pelabuhan Al Hudaydah dari Houthi dan memindahkannya di bawah yurisdiksinya. Houthi mengatakan mereka tidak menentang peran PBB dan setuju untuk memberikan PBB "peran pengawasan" dengan syarat koalisi Arab Saudi menarik pasukan militernya dari Hudaydah.[10] Di tengah tekanan internasional, koalisi Arab Saudi berjanji strategi untuk tidak memasuki daerah-daerah berpenduduk Hudaydah, tetapi bekerja untuk mengisolasi Houthi dengan memotong jalur pasokan mereka. Beragam laporan mengindikasikan bahwa pertempuran justru telah memperburuk situasi kemanusiaan di Yaman.[11]

b. Kebijakan Diplomasi

Selain melakukan kebijakan intervensi dalam bentuk militer, koalisi Arab Saudi juga melakukan kebijakan luar negeri melalui kebijakan diplomasi yang bertujuan untuk menghentikan perluasan konflik Yaman. Kebijakan mediasi yang diusahakan oleh Arab Saudi adalah dengan mendukung diadakannya ***Stockholm Agreement***. Pada 13 Desember 2018, pihak-pihak yang terlibat konflik di Yaman berkumpul di Stockholm, Swedia, dan menyetujui serangkaian usaha yang membangkitkan harapan dalam penyelesaian damai konflik yang dimulai pada 2015 dan telah menghasilkan krisis kemanusiaan yang tak terduga, selain itu juga terdapat dugaan bahwa adanya kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh semua pihak.[12]

Stockholm Agreement mendiskusikan tentang apakah para pihak akhirnya mencapai perdamaian untuk Yaman. Perjanjian ini berisi dua sub perjanjian penting lainnya, yaitu Perjanjian Taiz dan Perjanjian Hoeidah. Dalam perjanjian Stockholm disepakati keputusan sebagai berikut :

1. Perjanjian tentang kota Hodeidah dan pelabuhan Hodeidah, Salif dan Ras Issa.
2. Mekanisme eksekutif untuk mengaktifkan perjanjian pertukaran tahanan.
3. Pernyataan pemahaman tentang Taïz.

Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2452 (2019) sebagai mandat untuk mendukung perjanjian Stockholm. Dengan suara bulat, melalui resolusi ini Dewan Keamanan menetapkan untuk membentuk misi politik khusus untuk mendukung gencatan senjata antara pemerintah Yaman dan militan Houthi yang disebut dengan United Nations Mission to support the Hodeidah Agreement (UNMHA).

[9] "Assault on key Yemeni port would endanger 300,000 children and 'choke off' aid for millions more: UNICEF chief". UN News. 12 June 2018. Diakses pada tanggal 20 November 2019

[10] The National. 2018. Houthis refuse to withdraw from Yemen's Hodeidah, https://www.thenational.ae/world/mena/houthis-refuse-to-withdraw-from-yemen-s-hodeidah-1.751448. Diakses pada tanggal 21 November 2019

[11] Unicef. 2018. Access to water continues to be jeopardized for millions of children in war-torn Yemen.https://www.unicef.org/mena/press-releases/access-water-continues-be-jeopardized-millions-children-war-torn-yemen. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019

[12] Stockholm Agreement, Dec. 13, 2018, diakses melalui https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/hodeidah_agreement_0.pdf pada tanggal 20 November 2019

Adapun tugas dari UNMHA adalah[13] :

a. untuk memimpin, dan mendukung fungsi dari Redeployment Coordination Committee, dibantu oleh sekretariat yang dikelola oleh personel PBB, untuk mengawasi gencatan senjata di seluruh provinsi, penempatan kembali pasukan, dan operasi aksi ranjau,
b. untuk memantau kepatuhan para pihak terhadap gencatan senjata di provinsi Hodeidah dan penempatan bersama pasukan dari kota Hodeidah dan pelabuhan Hodeidah, Salif dan Ras Issa,
c. untuk bekerja dengan pihak-pihak sehingga keamanan kota Hodeidah dan pelabuhan Hodeidah, Salif, dan Ras Issa dijamin oleh pasukan keamanan lokal sesuai dengan hukum Yaman, dan
d. untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan dukungan PBB untuk membantu para pihak untuk sepenuhnya mengimplementasikan Perjanjian Hodediah.

4. Kebijakan Bantuan Kemanusiaan

Arab Saudi telah menjadi donor tunggal terbesar bantuan kemanusiaan ke Yaman, dengan menyediakan lebih dari $ 847 juta dalam bantuan kemanusiaan. Pada April 2015, sebagai tanggapan atas seruan oleh United Nations Custodian of the Two Holy Mosques, Raja Salman bin Abdulaziz memerintahkan sumbangan $ 274 juta kepada PBB untuk mendukung upaya kemanusiaan di Yaman. Pada Mei 2015, Arab Saudi membentuk Pusat Bantuan dan Bantuan Kemanusiaan King Salman atau yang disebut dengan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSRelief) untuk memberikan bantuan yang lebih efektif kepada rakyat Yaman. Arab Saudi kemudian menyumbangkan tambahan $ 267 juta.[14]

KSRelief juga bekerja sama dengan *UN International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dalam melatih 3.153 petugas kesehatan tentang manajemen sosial kekurangan gizi akut dan membuka 854 pusat untuk program gizi terapeutik. Program ini juga menyediakan perawatan medis dan menindaklanjuti kasus kekurangan gizi akut. Tim kesehatan keliling KSRelief telah merawat lebih dari seperempat juta anak yang menderita kekurangan gizi akut dan memberikan imunisasi dan perawatan pascanatal kepada lebih dari 1,2 juta anak di seluruh Yaman. Tim juga menyediakan layanan untuk wanita hamil dan perawatan pasca melahirkan untuk lebih dari 220.000 wanita.[15]

KSRelief juga telah meluncurkan 51 proyek di bidang kesehatan, gizi, air dan sanitasi lingkungan di Yaman dengan total lebih dari $ 208 juta dan memberi manfaat bagi 24,5 juta warga Yaman, di samping program-program yang menyediakan perawatan medis dan perawatan untuk orang-orang di dalam wilayah Yaman. Bekerja sama dengan WHO, KSRelief menyediakan layanan dasar seperti diabetes dan obat-obatan kanker, dan mendukung pengoperasian ruang gawat darurat dengan menyediakan 350.000 galon bahan bakar untuk 88 rumah sakit dan 19 fasilitas kesehatan di Yaman. Hingga saat ini, KSRelief telah menyediakan

[13] United Nations. Januari 2019. Adopting Resolution 2452 (2019), Security Council Establishes Special Political Mission to Support Ceasefire between Yemen's Government, Houthi Militia. Diakses melalui https://www.un.org/press/en/2019/sc13664.doc.htm pada tanggal 11 November 2019

[14] White House

[15] ibid

lebih dari 12 juta vaksin untuk anak-anak Yaman terhadap campak, rubella, tetanus dan batuk rejan. Kemudian pada Januari 2017, KSRelief mendistribusikan 300.000 keranjang makanan di Provinsi Hodeidah, Yaman. Keranjang diharapkan memberi manfaat lebih dari 460.000 orang Yaman yang membutuhkan.[16]

Gambar 4.5 Total Bantuan Arab Saudi ke Yaman (April 2015 – April 2017)

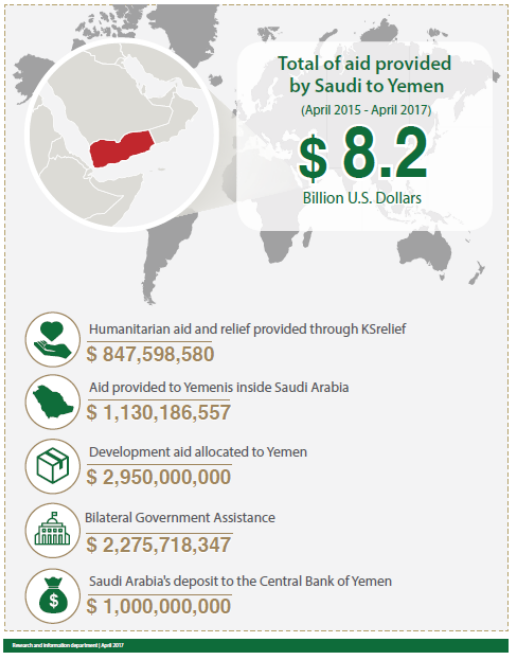

Sumber : White Paper Yemen

Alasan Arab Saudi Mengambil Kebijakan Intervensi dalam Konflik Yaman di Masa Pemerintahan Raja Salman

Terdapat beberapa alasan yang menjadikan Arab Saudi melakukan kebijakan intervensi dalam konflik militer tahun 2015 – 2019 di bawah pemerintahan Raja Salman ini, yaitu :

1. Pencegahan Perluasan Konflik Yaman untuk Mengamankan Stabilitas Keamanan Arab Saudi

Faktor keamanan merupakan hal utama yang paling penting bagi sebuah negara dan faktor keamanan ini menjadi penentu bagi kelancaran kebijakan pemerintahan dalam berbagai aspek. Letak geografis Yaman di Timur Tengah, Yaman memiliki posisi yang sangat strategis karena wilayah perairannya merupakan pintu masuk kapal-kapal yang dari dan menuju Terusan Suez. Selain itu pelabuhan Aden merupakan pelabuhan tersibuk ketiga di dunia, karena banyaknya kapal-kapal yang datang dari dan ke Eropa berlayar melewati perairan tersebut. Arab Saudi sebagai negara penghasil dan pengekspor minyak terbesar di dunia tentu memiliki kepentingan yang signifikan dalam wilayah perairan Yaman di teluk Aden.

Pemberontak Houthi di Yaman merupakan sebuah ancaman bagi keamanan nasional Arab Saudi. Salah satu ancaman Houthi terhadap Arab Saudi terlihat dari adanya serangan rudal balistik yang diluncurkan Houthi ke wilayah Riyadh pada bulan November 2017.[17] Arab Saudi turut menyalahkan Iran atas peluncuran rudal yang ditembakkan dari Yaman dan jatuh di dekat bandara Riyadh tersebut. Arab Saudi menyimpulkan bahwa puing-puing rudal tersebut berasal dari pabrik Iran sehingga menganggap Iran harus bertanggung jawab dan menyebutnya sebagai "agresi militer oleh rezim Iran" serta "ajakan untuk berperang."[18] Iran membantah bahwa mereka bertanggung jawab atas rudal tersebut, tetapi mereka menganggap bahwa penembakan rudal tersebut

[16] *ibid*

[17] Gladstone, R. Iran Violated Yemen Arms Embargo, U.N. Experts Say(daring). 12 Januari 2018. https://www.nytimes.com/2018/01/12/world/middleeast/iran-yemen-saudi-arabia-arms-embargo-un.html, diakses pada 2 Maret 2018.

[18] *ibid*

merupakan tindakan pembalasan yang wajar mengingat pemboman oleh koalisi Saudi di Yaman.[19] Pada awal 2018, sebuah panel Perserikatan Bangsa Bangsa telah menyimpulkan bahwa Iran telah terbukti melanggar embargo senjata yang diberlakukan terhadap Yaman, karena Teheran gagal mencegah pemberontak Houthi mendapatkan rudal Iran, termasuk satu yang ditembakkan ke Arab Saudi pada November 2017.[20]

Arab Saudi yang merupakan negara tetangga Yaman, akan mendapatkan dampak langsung pada kestabilan keamanan di Yaman. Jika kestabilan wilayah Yaman terganggu dengan melemahnya pemerintah pusat akibat dari serangan Houthi, maka kepentingan integritas wilayah di Arab Saudi juga akan terganggu. Oleh karena itu, untuk mencegah perluasan konflik demi menjamin stabilitas keamanan Yaman yang nantinya akan bercermin pada integritas wilayah Arab Saudi, maka Arab Saudi mengambil kebijakan untuk melakukan intervensi militer dalam Konflik Yaman pada masa pemerintahan Raja Salman. Kebijakan Intervensi Militer ini bertujuan untuk mencegah perluasan konflik demi kepentingan integritas wilayah Arab Saudi yang terancam oleh beberapa hal seperti, serangan Houthi di perbatasan Arab Saudi yang mengakibatkan banyaknya warga sipil Arab Saudi menjadi korban dan bangunan Arab Saudi hancur; meningkatnya alur migrasi dari Yaman ke Arab Saudi; serta ekonomi Arab Saudi yang terancam akibat ketidksabilan jalur ekspor minyak dan serangan Houthi pada kilang minyak Arab Saudi pada tahun 2019.

2. Pencegahan Perluasan Konflik Yaman untuk Menghentikan Ambisi Ekspansi Iran

Ancaman lain yang dirasakan oleh Arab Saudi adalah kekhawatiran akan semakin menguatnya pengaruh Iran di wilayah Teluk. Arab Saudi melihat agresi Houthi sebagai sebuah perpanjangan tangan Iran, dan khawatir Yaman akan jatuh di bawah pengaruh Iran. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, mengatakan bahwa Arab Saudi 'terpaksa' berperang di Yaman karena ia melihat adanya keterlibatan Iran dan Hizbullah dalam menyuplai rudal balistik milisi pemberontak Houthi.[21] Bagi Arab Saudi, langkah militer dengan menyerang pemberontak Houthi dianggap sebagai cara yang tepat untuk mencegah ekspansi pengaruh Iran di wilayah Teluk. Hal ini tercermin dari pernyataan Kedutaan Besar Arab Saudi yang menyatakan bahwa krisis yang terjadi di Yaman merupakan "akibat dari campur tangan Iran dalam urusan internal Yaman untuk merusak stabilitas keamanan Yaman."[22] Dari pernyataan tersebut tercermin bahwa selain pemberontakan, kemungkinan terlibatnya Iran dalam mendukung Houthi juga menjadi ancaman keamanan yang diwaspadai Arab Saudi dalam konflik internal di Yaman.

[19] *ibid*

[20] Gladstone, R. Iran Violated Yemen Arms Embargo, U.N. Experts Say(daring). 12 Januari 2018. https://www.nytimes.com/2018/01/12/world/middleeast/iran-yemen-saudi-arabia-arms-embargo-un.html, diakses pada 2 Maret 2018.

[21] Boghani, P. Frontline. *The Rivalry Behind Three Wars: How Saudi Arabia and Iran Fueled Conflicts in Iraq, Syria and Yemen*(daring). 27 Februari 2018. http://apps.frontline.org/bitter-rivals-maps/, diakses pada 2 Maret 2019.

[22] Clausen, Maria-Louise. 2015. 'Understanding the crisis in Yemen: Evaluating competing narratives.' *The International Spectator* 50 (3): hal 20

3. Pencegahan Perluasan Konflik Yaman untuk Menjaga Kestabilan Keamanan Regional

Perdamaian di Semenanjung Arab sedang terganggu akibat adanya gelombang Arab Spring. Yaman, sebagai salah satu negara yang ikut mengalami gelombang ini turut serta menambah ketidakstabilan dalam keamanan kawasan. Dengan meningkatnya eskalasi konflik di Yaman, menyebabkan munculnya beberapa dampak yang menjadikan alasan oleh Arab Saudi untuk melakukan intervensi militer sebagai tujuan untuk mencegah perluasan konflik. Dampak konflik ini terhadap kawasan, yaitu:

a. Dampak *Balance of Power* pada Kawasan

Konflik Yaman yang dimulai dikarenakan adanya pemberontakan kelompok Houthi yang dibantu oleh Iran dikhawatirkan akan membuat kemampuan Houthi semakin meningkat dan nantinya membuat mereka merebut kekuasaan yang sah di Yaman. Kejadian ini dapat dilihat di Irak, di mana pasukan yang dekat dengan Iran membajak proses politik negara tersebut. Pengaruh Iran semakin meluas, tidak hanya di wilayah vital Negara-negara Teluk, tetapi juga di negara-negara tetangga geografis dan strategis lainnya di Tanduk Afrika, karena Yaman adalah pintu gerbang ke daerah ini melalui Semenanjung Arab.

b. Dampak pada Rute Laut Internasional

Campur tangan Iran di Yaman merupakan ancaman besar bagi keamanan jalur laut internasional. Dukungan militer Iran kepada milisi Houthi-Saleh, telah memungkinkan milisi ini untuk menyerang beberapa kapal yang beroperasi di Selat Bab Mandab dan Teluk Aden.[23] Iran telah mengirim kapal perang ke Teluk Aden dengan kedok menghadapi pembajakan, dan beberapa pejabat Iran telah menyatakan bahwa Iran berencana untuk membangun basis maritim di Yaman. Ini semua adalah indikasi bahwa konflik di Yaman dapat berubah menjadi perang regional komprehensif yang akan menghambat navigasi di Teluk Aden, Bab Mandab dan Laut Merah. Masalah ini juga bisa menghambat pasar minyak dan komersial di seluruh dunia, yang akan berdampak besar pada kepentingan negara-negara Teluk.

c. Dampak Meningkatnya Ancaman dari Kelompok Ekstremis

Salah satu efek negatif paling signifikan yang dikhawatirkan oleh Arab Saudi jika konflik Sipil Yaman semakin meluas adalah kontribusi konflik ini terhadap semakin tumbuhnya organisasi-organisasi ekstremis dengan potensi dapat menjadikan suatu negara menjadi negara gagal sehingga mengancam keamanan regional. Meningkatnya pengaruh Houthi dalam Konflik Yaman memberikan dampak yang bersamaan dengan meningkatnya sektarianisme di Yaman, yang menyebabkan eskalasi sentimen kebencian antara satu golongan agama dengan yang lain, dalam hal ini adalah Sunni – Syiah.

Dampak Kebjakan Intervensi Arab Saudi dalam Konflik Yaman pada Masa Pemerintahan Raja Salman

Dua setengah tahun setelah perang, situasi kemanusiaan di Yaman Utara digambarkan oleh statistik berikut: sekitar 15.000 warga sipil terbunuh oleh pemboman udara; sekitar 3 juta orang

[23] Iran plans to establish naval bases in Yemen and Syria, 26 November 2019. http://tutt.us/tlcQJ

terlantar secara internal; 7 juta orang yang kelaparan; 20 juta orang mengalami kekurangan makanan kronis; dan 500.000 orang yang terinfeksi kolera (termasuk lebih dari 2500 orang yang telah meninggal karena penyakit ini).[24] Tak hanya dampak dalam kemanusiaan, Yaman juga mengalami kerugian ekonomi yang luar biasa diakibatkan oleh konflik Yaman ini sendiri. Kerugian ekonomi Yaman mencapai miliaran dolar dalam kerusakan langsung, dan PDB negara itu menyusut 40 persen pada 2015–2016.[25]

Selama 2 tahun pertama setelah *Operation Decisive Storm* dilakukan pada Maret 2015, terdapat 16749 penyerangan udara dilakukan oleh koalisi Arab Saudi yang terdokumentasi. Dua pertiganya merupakan target non-militer atau target yang tidak diketahui. Berdasarkan dari jenis dan volume target sipil yang didokumentasikan, target-target pemboman ini termasuk tempat-tempat yang umumnya terlindungi dari serangan bahkan di bawah aturan lemah hukum humaniter internasional sekalipun yaitu: daerah perumahan, kendaraan, pasar dan masjid serta kapal, pertemuan sosial dan kamp pengungsian.

Konflik Yaman hingga saat ini masih kurang diperhatikan oleh banyak komunitas internasional. Namun pada bulan Juli 2017, pemimpin 3 Agensi PBB, yaitu UNICEF, the World Food Program, dan World Health Organization mulai memperhatikan konflik Yaman dan menyebutkan situasi di Yaman merupakan "krisis kemanusiaan terburuk".[26] UN OCHA pada bulan April 2018 ikut menambahkan bahwa Yaman saat ini tengah menghadapi krisis kemanusiaan terbesar di dunia.[27]

Salah satu faktor yang menentukan buruknya suatu peperangan adalah jumlah kematian yang diakibatkan oleh perang tersebut. Berdasarkan analisis Universitas Waterloo Canada,[28] jumlah masyarakat yang menjadi pengungsi baik di dalam Yaman maupun di perbatan Yaman serta jumlah masyarakat sipil yang mengalami kurangnya akses terhadap makanan juga termasuk ke dalam faktor buruknya dampak sebuah perang. Setiap indikator menceritakan bagian dari kisah konflik Yaman yang sangat rumit ini.

KESIMPULAN

Secara sosial dan kultural, Timur Tengah memiliki karakteristik yang khas, sekaligus menarik. Di kawasan inilah tiga agama besar dunia lahir, Yahudi, Kristen, dan Islam. Secara kultural Timur Tengah didominasi bangsa Arab dan umat Muslim, meskipun ada banyak suku dan agama lain yang juga berbagai tempat di

[24] Yemen Emergency Food Security and Nutrition Assessment (EFSNA) – 2016. Diakses melalui http://fscluster.org/sites/default/files/documents/efsna_-_preliminary_results_public_final1.pdf. Pada tanggal 15 Desember 2019

[25] Major Macro Economic Indicators. Yemen // COFAS. URL: http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Yemen

[26] WHO/WFP/UNICEF, "Statement by UNICEF Executive Director, Anthony Lake, WFP Executive Director, David Beasley and WHO Director-General, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Following their Joint Visit to Yemen," Diakses melalui https://reliefweb.int/report/yemen/statement-unicef-executive-director-anthony-lake-wfp-executive-director-david-beasley tanggal 25 November 2019

[27] UN OCHA, "2018 Yemen High Level Pledging Event," https://www.unocha.org/2018-yemen-high-level-pledgingevent

[28] https://uwaterloo.ca/centre-peace-advancement/sites/ca.centre-peace-advancement/files/uploads/files/yemenworkingpaper2018final.pdf

kawasan ini. Faktor geopolitik dan multietnik menjadi faktor yang membuat kawasan ini rawan konflik dan teror. Satu persatu peristiwa konflik membentuk dinamika politik di kawasan Timur Tengah.

Peristiwa *Arab Spring* telah membawa banyak perubahan di Timur Tengah. Berbagai negara terkena dampak dari fenomena *Arab Spring ini*, seperti negara Irak, Bahrain, Lebanon, Suriah dan Yaman. Di Yaman sendiri, *Arab Spring* terjadi pada tahun 2011 yang membuat Presiden Ali Abdullah Saleh mundur dari kepresidenannya dan digantikan oleh Presiden Mansour Hadi. Sumber protes Arab Spring di Yaman didalangi oleh kelompok Houthi, kelompok pemberontak yang ingin membuat negara baru di Yaman. Konflik di Yaman pun akhirnya pecah ketika pada September 2014, pemerintah Hadi membuat kebijakan untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak.

Kejatuhan rezim di Yaman menghadirkan peta politik baru yang mengundang perhatian khusus dari negara-negara *regional power* di kawasan Timur Tengah, salah satunya adalah Arab Saudi. Sebagai negara berpengaruh di kawasan ini dan berbatasan langsung dengan negara Yaman, Arab Saudi ikut terusik dengan pergolakan yang terjadi selama *Arab Spring*. Perubahan konfigurasi politik di negara Yaman yang dilanda *Arab Spring* turut berimbas pada kepentingan negara ini dalam mengejar prioritas kebijakan luar negeri mereka di kawasan.

Kebijakan Arab Saudi dibantu oleh koalisi GCC melakukan intervensi pada konflik Yaman pada tahun 2015 di bawah pemerintahan Raja Salman awalnya dianggap dikarenakan permintaan dari Presiden Mansour Hadi untuk menyelamatkan Yaman. Namun, terdapat beberapa alasan lain yang menyebabkan perubahan kebijakan Arab Saudi yang awalnya berhati-hati, hingga menjadi agresif dengan melakukan intervensi militer. Alasannya disebabkan karena wewenang hirarki yang dilakukan oleh Pangeran Muhammad bin Salman, Putra bin Salman dalam rezim *House of Saud* dan kepentingan Arab Saudi untuk mempertahakan status *Regional Leader* di kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan ancaman-ancaman yang telah dilakukan Iran kepada Arab Saudi, maka Arab Saudi membentuk koalisi dan melakukan intervensi pada konflik Yaman melalui tiga operasi intervensi. Operasi pertama disebut dengan *Operation Decisive Storm* yang dilakukan dari tanggal 25 Maret 2015 hingga 21 April 2015. Setelah berakhirnya *Operation Decisive Storm*, maka dilanjutkan dengan *Operation Restoring Hope* yang berlangsung sejak 22 April 2015 hingga saat ini dan *Operation Golden Victory* yang merupakan operasi terpisah dari *Operation Restoring Hope*, berlangsung dalam 3 fase, yaitu 13–22 Juni 2018 (1 minggu 2 hari), fase kedua tanggal 9–16 September 2018 (1 minggu) dan fase ketiga pada tanggal 1–13 November 2018 (1 minggu 5 hari).

Referensi tambahan :
Buku

Fink, Martin. 2017. Naval Blockade and the Humanitarian Crisis in Yemen, Amsterdam Centre for International Law (ACIL), University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

George Sorensen and Robert Jackson, *Introduction to International Relations*, (New York: Oxford University Press Inc, 1999).

John J. Mersheimer, *'Structural Realism' in: Tim Dunne, Miljka Kurki and Steve Smith [eds.] International Relations Theories*, (Oxford: University Press, 2007)

Jurnal

Clausen, Maria-Louise. 2015. 'Understanding the crisis in Yemen: Evaluating competing narratives.' The International Spectator 50 (3)

Cristian Nunlis, War in Yemen and Saudi Interventions, (Zurich: CSS Analysis in Security Policy, 2015)

Ghassan Shabaneh, "Operation Decisive Storm: Objectives and Hurdles", (Al Jazeera Centre for Studies, 2015)

Vinsensio Dugis, "Analysing Foreign Policy". Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Politik Universitas Airlangga. Th. XX No.2 (2007) https://www.researchgate.net/publication/287269388_Analysing_Foreign_Policy

Website

"Assault on key Yemeni port would endanger 300,000 children and 'choke off' aid for millions more: UNICEF chief". UN News. 12 June 2018. Diakses pada tanggal 20 November 2019

"Saudi Arabia, UAE, launch attack on Yemen's port city of Hudaida". Al Jazeera English.

Boghani, P. Frontline. The Rivalry Behind Three Wars: How Saudi Arabia and Iran Fueled Conflicts in Iraq, Syria and Yemen(daring). 27 Februari 2018. http://apps.frontline.org/bitter-rivals-maps/, diakses pada 2 Maret 2019.

Gladstone, R. Iran Violated Yemen Arms Embargo, U.N. Experts Say(daring). 12 Januari 2018. https://www.nytimes.com/2018/01/12/world/middleeast/iran-yemen-saudi-arabia-arms-embargo-un.html, diakses pada 2 Maret 2018.

Reuters. 2018. Arab states launch biggest assault of Yemen war with attack on main port. https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/arab-states-launch-biggest-assault-of-yemen-war-with-attack-on-main-port-idUSKBN1J90B. Diakses pada tanggal 20 November 2019

The National. 2018. Houthis refuse to withdraw from Yemen's Hodeidah, https://www.thenational.ae/world/mena/houthis-refuse-to-withdraw-from-yemen-s-hodeidah-1.751448. Diakses pada tanggal 21 November 2019

Unicef. 2018. Access to water continues to be jeopardized for millions of children in war-torn Yemen.https://www.unicef.org/mena/press-releases/access-water-continues-be-jeopardized-millions-children-war-torn-yemen. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019

Dokumen Resmi

Saudi Arabia Embassy, "White Paper: Saudi Arabia and Yemen Conflict", (April 2017), https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/WhitePaper_Yemen_April2017_0.pdf

Stenslie, Stig. 2015. “Decisive Storm”: Saudi Arabia’s attack on the Houthis in Yemen. Norwegian Peacebuilding Resource Center.

Stockholm Agreement, Dec. 13, 2018, diakses melalui https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/hodeidah_agreement_0.pdf

United Nations. Januari 2019. Adopting Resolution 2452 (2019), Security Council Establishes Special Political Mission to Support Ceasefire between Yemen’s Government, Houthi Militia. Diakses melalui https://www.un.org/press/en/2019/sc13664.doc.htm